



Empat Hotel

Menunggak Pajak Rp1 M

BPK DIY Minta Pemkot Yogya Lakukan Tahapan Penagihan

YOGYA, TRIBUN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menyoreti sedikitnya empat hotel yang menunggak pajak selama bertahun-tahun. Tunggakan atas pajak hotel ini menjadi temuan karena nilai totalnya mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 05/LHP/XVIII.YOG/01/2017 terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011-2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta. Kemudian satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 yang mencapai Rp493,8 juta.

BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kota (Pemkot) setempat melakukan tahapan-tahapan penagihan, mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan. Selain itu, Pemkot juga diminta untuk melakukan penyitaan aset.

Selain itu, Pemkot juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kedaluwarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari," tulis BPK dalam LHP tersebut.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK, DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Kholri menjelaskan, temuan tersebut muncul karena ada kelemahan menginventarisasi piutang pajak bermasalah dan update wajib pajaknya, sehingga muncul piutang yang berpotensi tak bisa ditagih.

Pemkot juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah

● ke halaman 14

- Ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011-2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta
- Satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 yang mencapai Rp493,8 juta
- Tunggakan atas pajak hotel ini menjadi temuan karena nilai totalnya mencapai lebih dari Rp1 miliar
- BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kota (Pemkot) setempat melakukan tahapan-tahapan penagihan
- Pemkot juga diminta untuk melakukan penyitaan aset
- DPRD temuan tersebut muncul karena ada kelemahan menginventarisasi piutang pajak bermasalah dan update wajib pajaknya

Isi Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Plt. Kepala

Empat Hotel Menunggak Pajak

● Sambungan Hal 13

"Dalam internal pansus yang hangat dan mencuat adalah wacana untuk penghapusan piutang pajak yang diatur dalam Perwal 19/2015. Wacana ini muncul salah satunya karena Pemkot kesulitan menelusuri keberadaan wajib pajak," kata dia.

Menurutnya, penghapusan piutang tak tertagih adalah solusi yang terakhir. Dia mendesak kepada Pemkot setempat, pri-

oritas utama yang harus dilakukan oleh eksekutif adalah menagih. Jika memang harus menghapus pun, harus ada persyaratan cukup ketat.

"Namun, memang skema penghapusan juga belum ada kejelasan karena hingga LHP BPK dirilis, belum ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengusulkannya," jelasnya.

Menurut politikus PKS ini, beberapa temuan ini sebenarnya bisa dihindari jika sejak awal Pemkot telah memiliki sistem pengawasan dan pengendalian tata kelola pajak daerah yang kuat. Pemkot pun

juga telah memiliki Perda 1/2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Wali Kota 51/2011 sebagai petunjuk pelaksanaannya.

"Hanya pada kenyataannya, Pemkot belum memiliki acuan dan tahapan yang jelas untuk proses eksekusi piutang," ulasnya.

Nasrul menyebut, temuan pajak hotel ini memang persoalan tahunan yang selalu tercantum dalam LHP BPK. Selain pajak hotel, beberapa di antaranya juga menjadi temuan tahunan seperti, retribusi sampah, dan juga pajak reklame.

Menurutnya, temuan ini merupakan momentum

penting untuk membenahi kinerja Pemkot dalam mengelola pendapatan daerah. Karena, tahun ini dana transfer dari pemerintah pusat banyak yang terkoreksi sehingga sumber dana yang bisa dimaksimalkan hanya dari pos pendapatan daerah.

Dia mengatakan, Pansus akan bekerja selama dua bulan sebelum proses penyusunan rencana kerja tahun 2018 rampung paling lambat Mei mendatang. Karena hasil kerja pansus juga akan disodorkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rencana kerja 2018. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005